



KELUHKAN PERPANJANGAN PTKM Pekerja Informal 'Wadul' Dewan

YOGYA (KR) - Sejumlah pekerja sektor informal mengeluhkan perpanjangan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Pasalnya kebijakan tersebut dirasa setengah-setengah, tidak efektif, dan justru berimbas pada pemasukan mereka.

"Kami sangat mendukung upaya Pemerintah dalam memutus rantai Covid-19. Hanya saja, kebijakan PTKM ini kami rasa hanya setengah-setengah. Dimana kami tidak diberikan keleluasaan dalam berusaha. Di sisi lain, kami juga tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Pemerintah," kata Denta Yunan Sukma selaku perwakilan pedagang ketika bersilaturahmi dengan Komisi D DPRD DIY, Selasa (26/1).

Dikatakan, selama ini pedagang informal tidak termasuk dalam masyarakat miskin, sehingga tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari Pemerintah. Jika mau *lockdown* total, mereka tidak mempermasalahakan. Bahkan mendukung. Namun mereka meminta kebutuhan mereka dipenuhi oleh Pemerintah.

Mereka juga meminta ada kelonggaran

waktu dalam berusaha. Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 mereka telah berupaya menerapkan protokol kesehatan. Apalagi saat ini termasuk masa *low season*, sehingga kunjungan wisatawan memang cenderung turun. "Contohnya untuk pedagang kakilima (PKL) khususnya kuliner di Malioboro. Sebagian besar jualannya pada malam hari. Otomatis sekarang tidak bisa jualan, karena adanya jam pembatasan operasional," terangnya.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan mengaku sepakat dengan masukan mereka. Pasalnya persebaran virus tidak hanya pada malam hari. Melainkan setiap saat. Daripada pembatasan jam operasional, lebih baik diperketat protokol kesehatannya. "Karena pembatasan itu justru berpotensi menimbulkan kerumunan. Akan jauh lebih efektif dengan pengetatan proses. Misalnya, jumlah pengunjung tempat makan maksimal 25 persen saja. Kepada pedagang juga harus patuh. Salah satunya dengan mencuci peralatan makan dengan air mengalir," ujarnya.

(Awh/Bro)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Dinas Pariwisata			
4. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005